



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 700/07.A/INSP/2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa peta proses bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi inspektorat agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penataan tatalaksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dnegan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2851) ;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tetah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 120 Tahun 2019 tentang Peta Proses Bisnis Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

KESATU : Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan, tujuan dan sasaran serta tatakelola organisasi maka Peta Proses Bisnis Inspektorat dapat dilakukan penyesuaian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

**Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta**



Nuryatna, SE, M.Si

Pembina Utama Muda / IV C

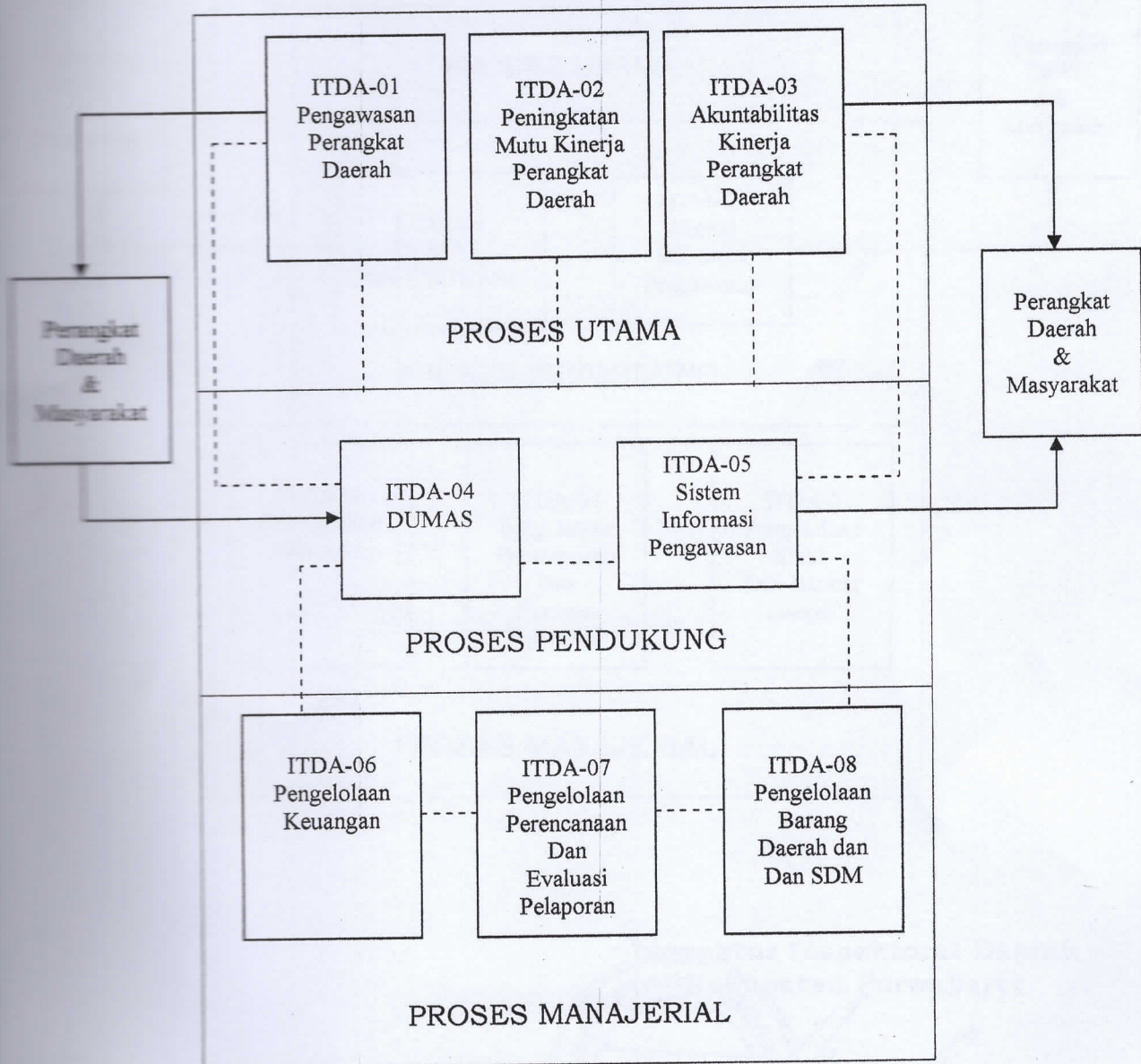
NIP.19640214 199903 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kabupaten Purwakarta;

2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

**PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWAKARTA
(Level I)**

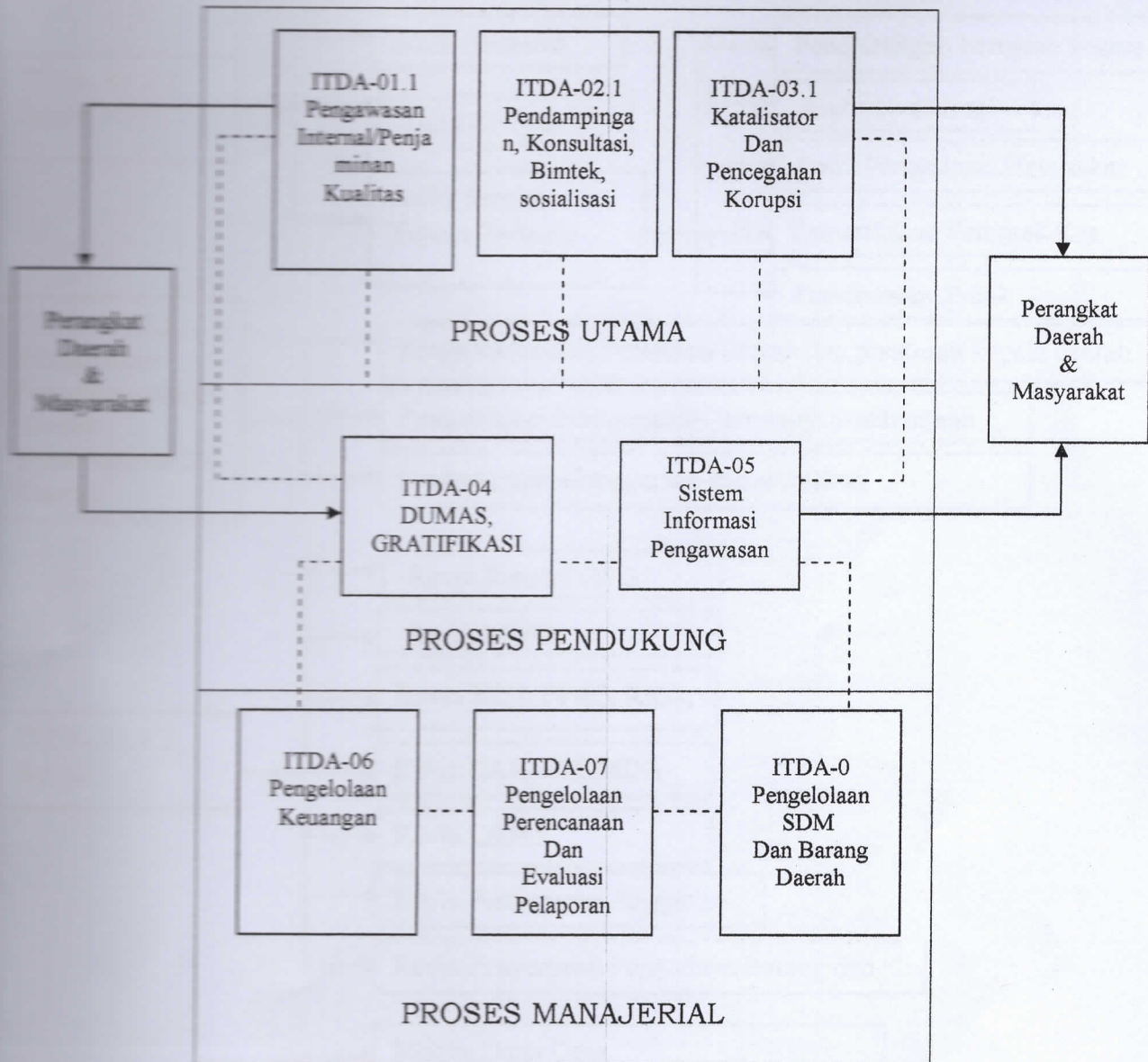


**Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta**



Nuryatna, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP.19640214 199903 1 007

**PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWAKARTA
(Level II)**



**Inspektur Inspektorat Daerah
Kabupaten Purwakarta**

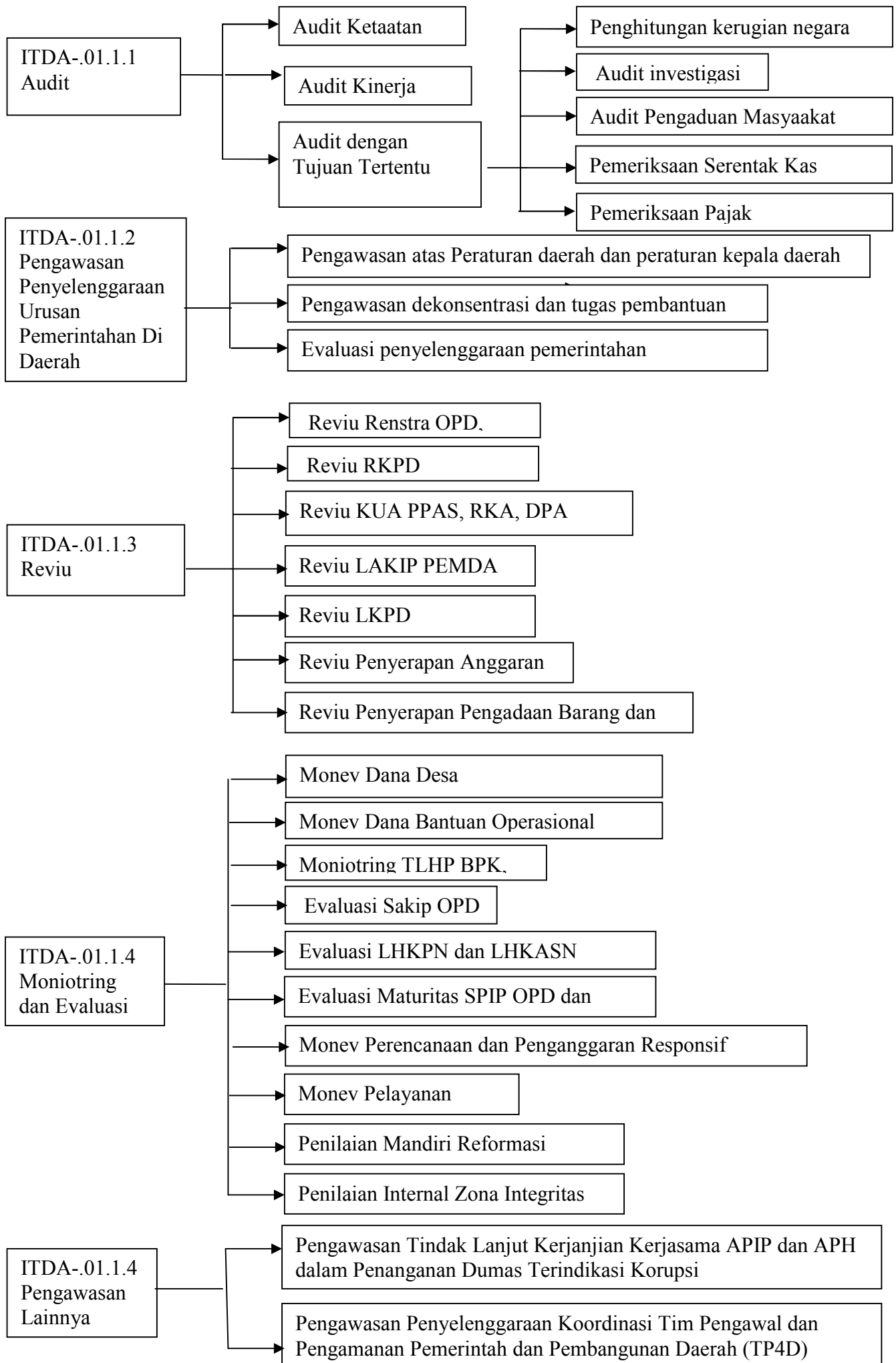


Nuryatna
Nuryatna, SE, M.Si

**Pembina Utama Muda / IV C
NIP.19640214 199903 1 007**

**PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWAKARTA
(Level III)**

**SUB PROSES BISNIS (ITDA-01.1)
Pengawasan Intern/Penjaminan Kualitas**



SUB PROSES BISNIS (ITDA-02.1)
Pendampingan, Bimtek, Sosialisasi Dan Konsultasi

SUB PROSES BISNIS ITDA-.02.1.1
Pendampingan, Bimtek, Sosialisasi
Dan Konsultasi

- Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan SPIP
- Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan Reformasi Birokrasi
- Sosialisasi/Bimtek/Pendampingan Zona Integritas
- Konsultasi

SUB PROSES BISNIS (ITDA-03.1)
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

SUB PROSES BISNIS ITDA-.03.1.1
Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi

- Wistle Blower System
- Pengendalian Gratifikasi
- MCP KOPSURGAH
- Saber Pungli

**SUB PROSES BISNIS (ITDA-06.1)
PENGELOLAAN KEUANGAN**

ITDA 06.1.1
Pengelolaan Keuangan

- Penginputan SPJ ke SIMDA
- Pembuatan SPP,SPM
- Register
- Rekapitulasi Pajak
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
- Penyusunan LRA,CALK

**SUB PROSES BISNIS (ITDA-07.1)
PENGELOLAANPERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN**

ITDA-07.1.1
Penyusunan Perencanaan
Pembangunan

- Penyusunan Renstra
- Penyusunan Rencana Kerja
- Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- Penetapan Kinerja
- Penyusunan PKPT Berbasis Risiko

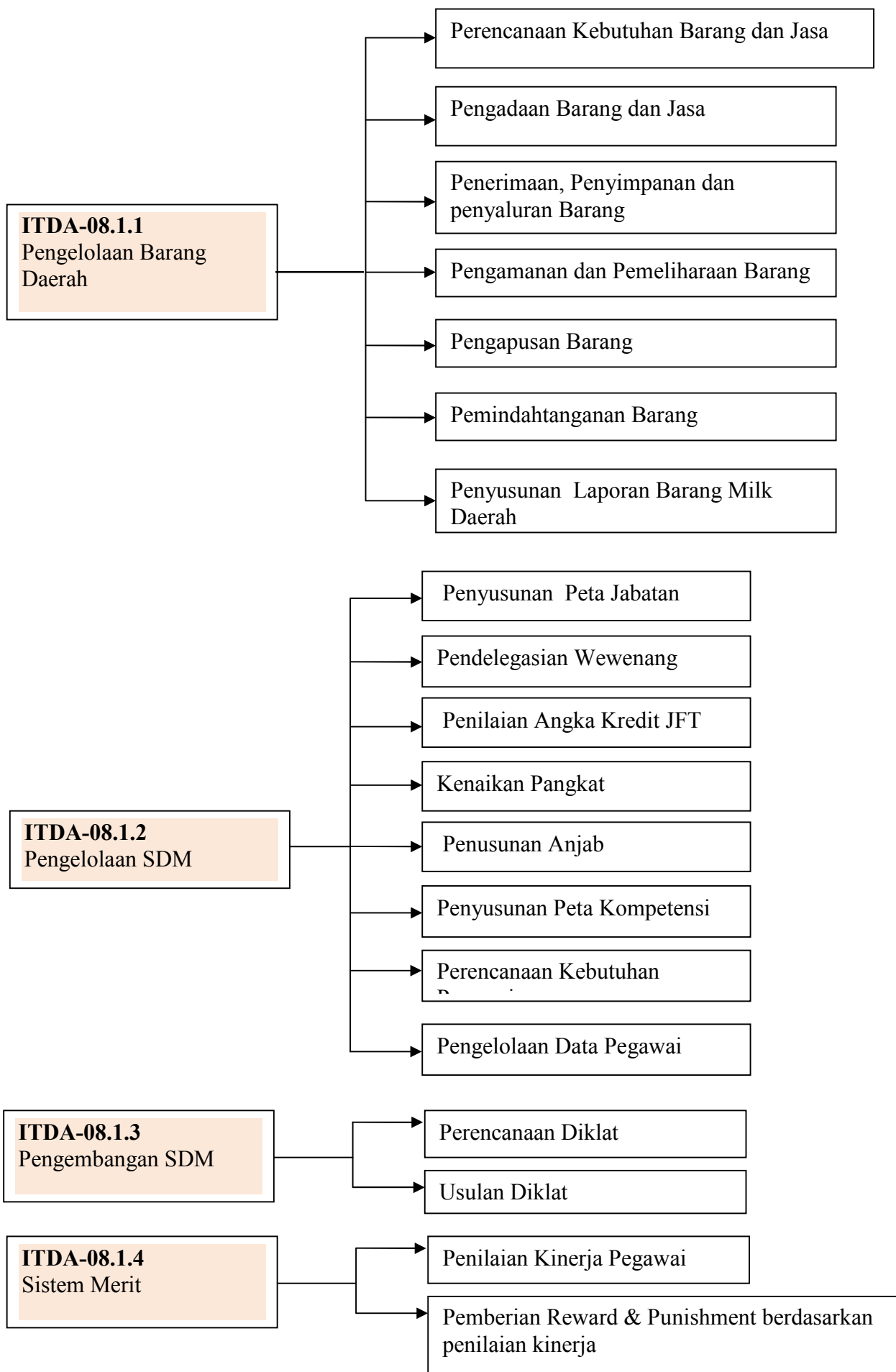
ITDA-07.1.2
Penyusunan Rencana
Anggaran

- Pengusulan anggaran
- Penyusunan RKA/DPA/AKB

ITDA-07.1.3
Pengelolaan Evaluasi dan
Laporan

- Penyusunan Laporan Kinerja APIP
- Penyusunan LAKIP
- Penyusunan LPPD
- Penyusunan LKPj
- Penyusunan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan
- Pengkoordinasian laporan MCP Korsupgah
- Pengkoordinasian laporan Stranas Penanggulangan Korupsi
- Monev Kinerja Inspektorat

**SUB PROSES BISNIS (ITDA-08.1)
PENGELOLAAN BARANG DAERAH DAN SDM**



PETA RELASI

ITDA-01.1, ITDA-02.1, ITDA-03.1
Pengawasan , Peningkatan Mutu Kinerja, Akuntabilitas Kinerja

BUPATI

OPD
(Dinas, Badan, Kantor,
Kecamatan, Desa)

APIP

SUBAG PERENCANAAN &
EVLAP

SUBAG KEUANGAN

SUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

MASYARAKAT

PETA LINTAS FUNGSI

ITDA-01.1, ITDA-02.1, ITDA-03.1
Pengawasan , Peningkatan Mutu Kinerja, Akuntabilitas Kinerja

